

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu global yang telah lama menjerat masyarakat dunia yang hingga saat ini belum mampu diatasi oleh pemerintah di berbagai negara. Fenomena tersebut dapat terlihat dari jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah. Dewasa ini, Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada angka 8,57 persen dari total populasi Indonesia atau setara dengan 24,06 juta orang pada September 2024. Angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan target angka kemiskinan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 persen - 7,5 persen. Masalah kemiskinan ini menjadi pusat perhatian pemerintah sehingga melakukan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan dengan maksud untuk menekan tingkat kemiskinan.

Menurut Nurkse (1953) dalam bukunya yang berjudul "Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries", kemiskinan terjadi bukan karena aspek ekonomi saja, tetapi juga sebagai akumulasi dari aspek sosial, budaya dan politik. Kemiskinan dapat dibedakan atas *Income Poverty* (kemiskinan pendapatan) dan *Non Income Poverty* (kemiskinan non-pendapatan). *Income Poverty* berasumsi bahwa kemiskinan disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (*basic needs approach*). *Non Income poverty* melihat



in sebagai

kondisi multidimensi, tidak hanya karena kekurangan uang (pendapatan), tetapi juga karena akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti tingkat pendidikan, pemenuhan gizi, partisipasi politik, dan lain sebagainya.

Salah satu dampak dari aspek ekonomi adalah rendahnya produktivitas manusia sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan sehingga keterampilan yang dimiliki terbatas. Rendahnya produktivitas manusia dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima sehingga berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi. Investasi dapat berupa modal (kapital), maupun investasi untuk peningkatan kualitas SDM dengan ukuran pendidikan. Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian faktor yang saling berinteraksi, menyebabkan suatu negara tetap terjebak dalam kemiskinan dan menghadapi berbagai kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

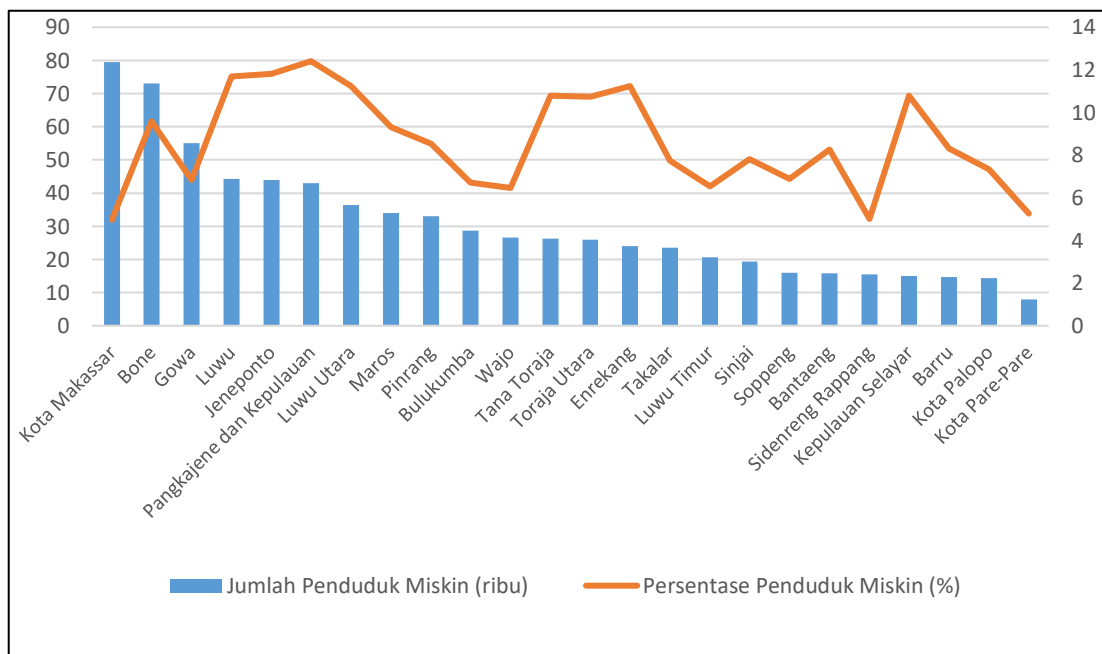
BPS melaporkan nilai garis kemiskinan (GK) di Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar Rp 595.242/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 408.552 (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 141.936 (25,79 persen). Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.803.590/rumah tangga miskin/bulan. Jika dibandingkan dengan maret 2024, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp 12.310/kapita/bulan. Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan telah meningkat sebesar Rp 136.295 /kapita/bulan dari Rp 458.947/kapita/bulan pada September 2020 menjadi Rp 595.242/kapita/bulan pada September 2024. Jika dihitung dari



sebesar Rp 19.841/kapita/hari. Artinya, masyarakat dengan pengeluaran yang lebih rendah dari standar tersebut (Rp 19.841//hari) tergolong ke dalam

masyarakat miskin. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

Kemiskinan tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, melainkan juga terjadi pada tingkat wilayah baik skala provinsi maupun kabupaten hingga ke daerah yang lebih kecil. Kondisi tersebut juga terjadi di Pulau Sulawesi, dimana kemiskinan menjadi isu yang telah ada sejak dahulu hingga sekarang. Fenomena kemiskinan ini terlihat seperti sebuah warisan, yang turun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar berada di Kabupaten Bone yang mencapai angka 73,03 ribu jiwa pada September 2024. Angka tersebut menyumbang setidaknya 9,58 persen dari total jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan



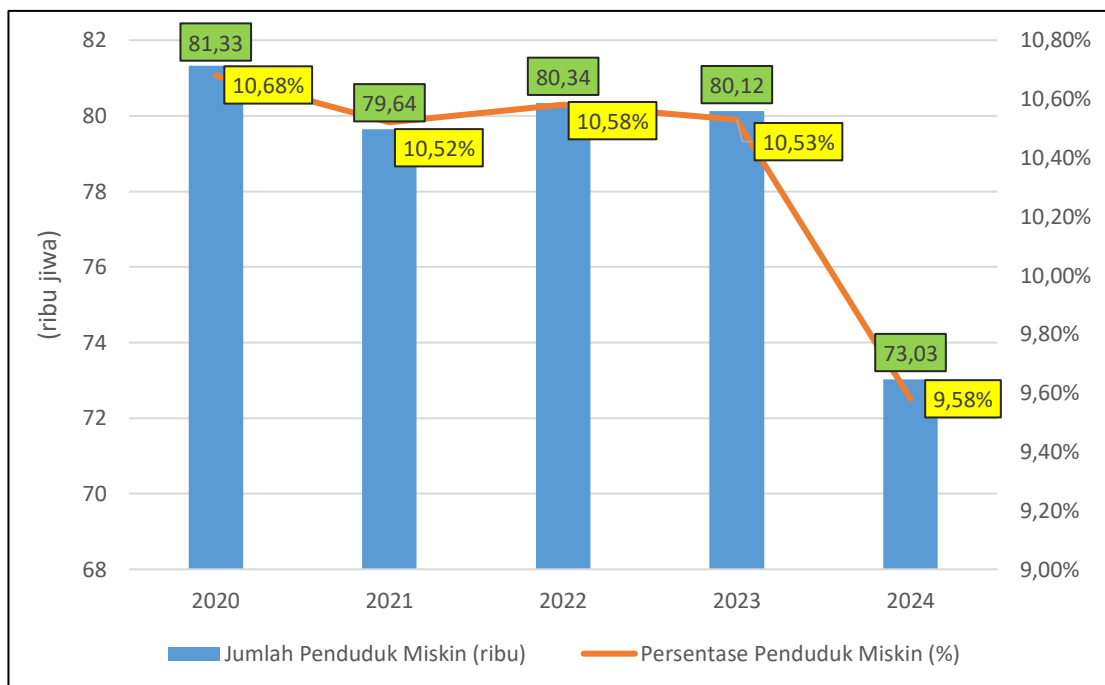
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 ( diolah)

**Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024**



ata jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas paten dan tiga Kota, menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi

cenderung beragam. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, Kabupaten Bone menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk miskin sebesar 73,03 ribu jiwa pada tahun 2024 dan peringkat pertama pada tahun 2023. Di sisi lain, Kota Pare-Pare menampilkan jumlah penduduk miskin terendah sebesar 7,94 ribu jiwa. Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone berfluktuasi pada periode Maret 2020 - Maret 2024, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada Maret 2020 dan yang terendah terjadi pada Maret 2024. Tingginya tingkat kemiskinan pada Maret 2020 diakibatkan adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan bahkan mengalami PHK



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (Data diolah 2025)

**Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bone Tahun 2020 – 2024**

Berdasarkan data yang tersaji di atas, dapat diketahui bahwa jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bone pada Maret 2023 adalah 10,53 persen atau menurun 0,05 persen poin dibandingkan Maret 2022, yang sebesar 10,58 persen.



namun meningkat sebesar 0,01 persen poin dibandingkan dengan Maret 2021. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone kembali mengalami penurunan sebesar 0,95 persen dari angka 10,53 persen pada Maret 2023 menjadi 9,58 persen pada Maret 2024.

BPS melaporkan nilai garis kemiskinan (GK) di Kabupaten Bone pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 423.727/kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp15.483. Pada periode Maret 2020 hingga Maret 2024, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan telah meningkat sebesar Rp 78.718/kapita/bulan dari Rp 345.009/kapita/bulan pada Maret 2020 menjadi Rp 423.727/kapita/bulan pada Maret 2024. Jika dihitung dari besaran GK, standar pengeluaran minimum masyarakat adalah sebesar Rp 14.000 per hari. Artinya masyarakat dengan pengeluaran yang kurang dari standar tersebut tergolong ke dalam masyarakat miskin.

Karakteristik rumah tangga dari aspek sosial dalam penelitian ini yaitu pendidikan kepala rumah tangga. Pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang yang besar bagi kepala rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak di sektor formal. Pendidikan menjadi investasi penting bagi setiap individu. Melalui pendidikan setiap orang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat berkontribusi pada tingkat produktivitasnya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara berkembang terus menekankan urgensi pendidikan agar kelak tercipta sumber daya manusia yang kompeten dan produktif. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak guna meningkatkan kualitas hidup



Indonesia. Salah satu strategi yang dijalankan pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas SDM adalah dengan melakukan kebijakan wajib belajar dua tahun. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan

rumah tangga dalam menghadapi berbagai masalah dan meningkatkan kualitas hidup dengan pendapatan yang lebih tinggi. Geda dkk., (2005), mengemukakan bahwa pendidikan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pendidikan telah diakui sebagai alat fundamental untuk mencegah kemiskinan. Teori modal manusia yang dikemukakan oleh Becker (1964) dalam bukunya "*Human Capital*" menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam tulisannya bahwa manusia yang mengenyam pendidikan yang tinggi akan mendapatkan pekerjaan serta upah yang lebih layak. Rendahnya tingkat pendidikan individu di Kabupaten Bone menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Jamir dan Ezung (2017) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang negatif antara pendidikan dan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terjebak dalam kemiskinan. Tingkat pendidikan yang baik dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi individu atau suatu rumah tangga. Peluang kerja yang lebih tinggi akan diiringi dengan pendapatan yang lebih besar. Efek berkelanjutan ini pada akhirnya dapat membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan.

Todaro dan Smith (2011), menyatakan para pelajar yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi, sedangkan anak-anak dari keluarga yang tergolong miskin akan sangat sulit untuk melanjutkan



annya ke jenjang yang lebih tinggi. Jika persentase penduduk miskin di daerah rendah, maka diharapkan akan berpengaruh ke rata-rata lama li daerah tersebut. Menurut Susanto et al., (2018) tingkat pendidikan yang

lebih tinggi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang lebih baik, produktivitas individu akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menjauhkan individu tersebut dari kemiskinan.

Aspek demografi dalam penelitian ini adalah jenis kelamin kepala keluarga dan jumlah anggota keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Yulia Putri (2019), menunjukkan bahwa secara umum, terdapat korelasi positif antara kemiskinan dan gender, terutama pada rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan. Rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki. Untuk mencegah perempuan mengalami kecenderungan hidup dalam kemiskinan, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap inisiatif penanggulangan kemiskinan dengan memprioritaskan perempuan dan mengurangi kesenjangan gender. Faktor lain dari aspek demografi yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah jumlah anggota keluarga. Pada tahun 2024, rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kabupaten Bone adalah empat orang. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan semakin meningkat, sementara tingkat pendapatan kepala rumah tangga cenderung tetap. Situasi ini dapat mengakibatkan kemiskinan karena pendapatan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga.

Aspek ekonomi dalam penelitian ini adalah pekerjaan kepala rumah tangga. Menurut data hasil Susenas, lapangan pekerjaan utama penduduk bekerja di Kabupaten Bone pada tahun 2024 adalah pada sektor pertanian, kehutanan, anan dengan persentase 51,32 persen, kemudian disusul oleh lapangan sa-jasa (kategori G-U) sebesar 36,97 persen atau sekitar 150.603 orang. ra itu lapangan pekerjaan manufaktur (kategori B-F) menyerap



setidaknya 11,71 persen atau sekitar 47.710 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, penduduk bekerja di sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 4.254 orang. Kabupaten Bone yang terkenal sebagai pemasok komoditas beras terbesar di Sulawesi Selatan selaras dengan data yang disajikan oleh BPS. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap setidaknya 209.073 penduduk bekerja dari total 407.386 jiwa penduduk bekerja di Kabupaten Bone pada tahun 2024.

Karakteristik wilayah dalam penelitian ini dibedakan atas wilayah perkotaan dan perdesaan. Todaro (2006) menyatakan bahwa penduduk miskin umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah perdesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lain yang erat diselesaikan dengan sektor ekonomi tradisional. Hal ini berarti bahwa kemiskinan seringkali terkait dengan ketergantungan pada pertanian tradisional di daerah perdesaan dengan kesempatan untuk berkembang dan akses ke sumber daya ekonomi modern yang masih terbatas.

Status kemiskinan rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelompokan rumah tangga yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu miskin dan tidak miskin. Rumah tangga yang berstatus miskin adalah rumah tangga dengan pengeluaran perkapita di bawah angka garis kemiskinan yang telah ditentukan. Sementara rumah tangga yang berstatus tidak miskin adalah rumah tangga dengan pengeluaran perkapita berada di atas angka garis kemiskinan yang telah ditentukan.

## 1.2 Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Pendidikan Kepala Rumah tangga berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone?
2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone?
3. Apakah Jumlah Anggota Rumah Tangga berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone?
4. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga terhadap Status Kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone?
5. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Lokasi Tempat Tinggal terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone.
2. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Anggota Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone.



4. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone.
5. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh Lokasi Tempat Tinggal terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, terkhususnya pada bidang ilmu ekonomi perencanaan pembangunan, ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, serta ekonomi publik.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Untuk peneliti, mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, wawasan, serta informasi terkait masalah yang diteliti.
2. Sebagai acuan dalam mengatasi atau mengentaskan persoalan pendidikan yang berakibat terjadinya kemiskinan.
3. Sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat kemiskinan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Kemiskinan

Lingkaran setan kemiskinan merupakan rangkaian kekuatan yang saling berinteraksi dan menyebabkan suatu negara, terutama negara berkembang menghadapi banyak masalah untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi (Sriyana, 2021). Teori lingkaran setan kemiskinan atau *Vicious Circle of Poverty* dicetuskan oleh Ragnar Nurkse (1953), bahwa " *a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena memang miskin). Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan tidak memiliki ujung dan pangkalnya dan semua unsur pembentuk kemiskinan saling berkaitan.

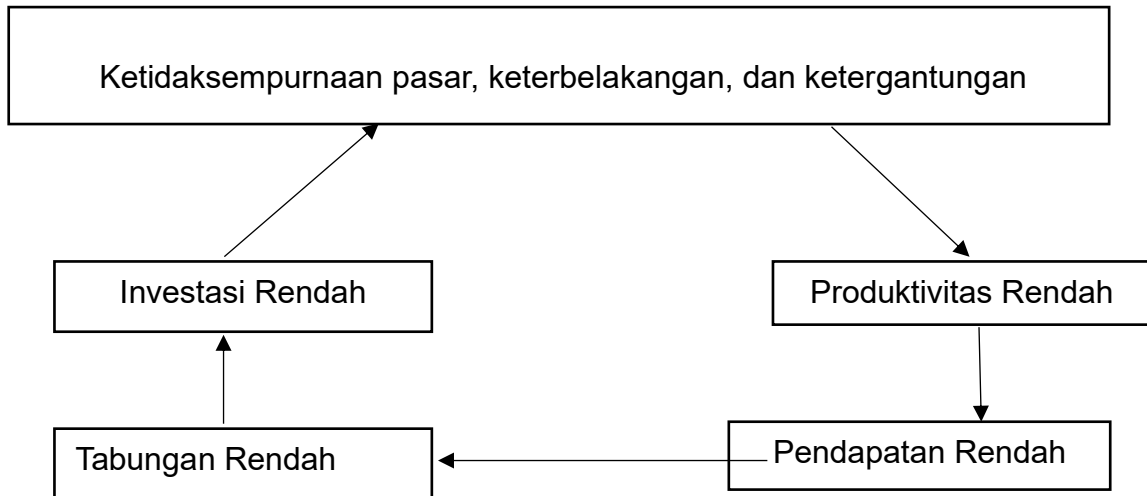
Teori ini kemudian dikembangkan oleh Sharp yang memandang kemiskinan dari segi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul akibat ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya, yang berdampak pada distribusi pendapatan yang tidak merata. Kelompok masyarakat miskin umumnya hanya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya alam dengan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan juga disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM yang rendah berakibat pada tingkat produktivitas yang rendah pula, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan atau upah. Faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas SDM meliputi tingkat pendidikan yang rendah, diskriminasi, faktor lingkungan, pola pikir, serta faktor keturunan. Ketiga,

an muncul akibat dari

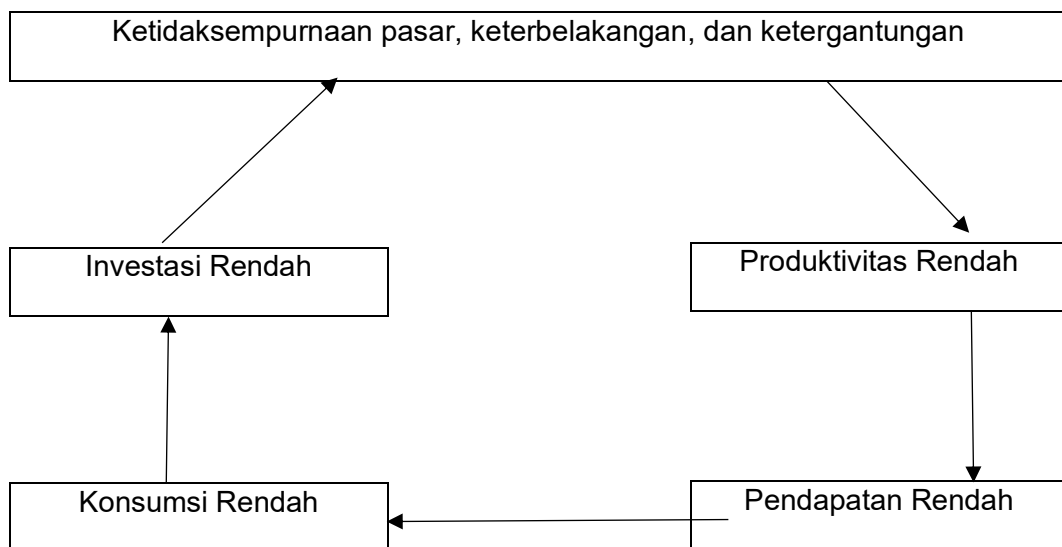


perbedaan akses terhadap permodalan, dimana kelompok miskin kesulitan memperoleh modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup.

### SUPPLY SIDE



### DEMAND SIDE



Sumber : Kuncoro, 2006

Teori Klasik yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang

*The Wealth of Nations* (1776) menyatakan bahwa "A man is rich or poor  
; to the degree in which he can afford to enjoy the necessaries,  
nces, and amusements of human life." Teori ini menekankan bahwa



kemiskinan terjadi karena ketimpangan distribusi sumber daya dan produktivitas kerja yang pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan. Produktivitas yang rendah berdampak pada rendahnya upah atau pendapatan yang diperoleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga membuka peluang untuk tergolong dalam kategori miskin.

Charles Booth dan Seebohm Rowntree dalam Lister (2004:20-21), mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan *"lacking sufficient money to meet basic needs"*. Defenisi tersebut mengacu pada kemiskinan absolut yang didasarkan pada istilah *subsistence* dan mengasumsikan *standard* universal, dimana seseorang dikatakan miskin apabila tidak memenuhi persyaratan minimum untuk mempertahankan hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) kemiskinan adalah kondisi dimana penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) ditentukan berdasarkan jumlah pengeluaran untuk konsumsi makanan yang kurang dari 2100 kalori per orang per hari, dengan menggunakan 52 jenis komoditi yang mewakili pola konsumsi masyarakat lapisan bawah. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) mengacu pada pengeluaran yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sandang, dan kebutuhan lainnya. Kemiskinan diukur dengan angka kemiskinan, yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di setiap provinsi. Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebagaimana ditentukan oleh BPS (Agussalim dkk., 2024).



Menurut Jhingan (2012), kemiskinan di antaranya disebabkan oleh ketimpangan manusia dan sumber daya alam. Pengelolaan SDA sangat berpengaruh pada keahlian produktivitas manusia, jika penduduknya banyak yang

miskin dan berpendidikan rendah dapat menyebabkan langkanya keterampilan teknik, pengetahuan, serta aktivitas kewirausahaan yang secara otomatis membuat sumber daya alam terbengkalai.

### 2.1.2 Indikator Kemiskinan

Dalam istilah ekonomi, secara teori garis kemiskinan dapat dihitung dengan tiga jenis pendekatan, yaitu: produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Saat ini, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk menentukan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM). Kebutuhan minimum pangan ditetapkan dengan patokan 2.100 kilo kalori/kapita/hari seperti yang dianjurkan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara garis kemiskinan non makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditas-komoditas terpilih yang meliputi perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.

Standar kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia berdasarkan pendapatan per kapita, dengan mengklasifikasikan individu yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari sepertiga pendapatan per kapita nasional sebagai golongan miskin. Dalam hal ini, Bank Dunia menetapkan standar pengeluaran minimum sebesar USD \$2 per orang per hari. Sementara itu BPS menetapkan nilai garis kemiskinan (GK) di Kabupaten Bone pada Maret 2024

sebesar Rp 423.727/kapita/bulan. Jika dihitung dari besaran GK, standar minimum masyarakat adalah sebesar Rp 14.000 per hari. Artinya



masyarakat dengan pengeluaran yang kurang dari standar tersebut tergolong ke dalam masyarakat miskin.

### 2.1.3 Macam – Macam Kemiskinan

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi menjadi empat bentuk, antara lain :

1. Kemiskinan absolut, adalah jenis kemiskinan yang ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bekerja. Individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok tersebut dianggap miskin.
2. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain kemiskinan relatif mencerminkan kondisi seseorang yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan orang di sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada masalah sikap masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Menurut Oscar Lewis (1996), masyarakat di dunia menjadi miskin disebabkan adanya budaya hidup rendah seolah-olah tidak peduli dengan perkembangan zaman, sehingga ingin hidup dengan semaunya sendiri tanpa ada perasaan untuk hidup jauh lebih baik, pasrah dengan keadaan, kurang pendidikan dan pengetahuan, kurang ambisi dalam membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan yang banyak terjadi.



4. Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang disebabkan kurangnya akses pada sumber daya yang terimbas dalam sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pengurangan kemiskinan, sehingga kemiskinan menjadi lebih subur.

#### **2.1.4 Kemiskinan Rumah Tangga**

Kemiskinan dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu dari sisi makro dan mikro. Dari sudut pandang makro, kemiskinan dilihat dalam konteks agregat dan cakupan yang luas. Sebaliknya, pendekatan mikro diperlukan untuk memahami secara mendalam kondisi kemiskinan, termasuk siapa saja yang terkena dampaknya dan bagaimana karakteristiknya. Analisis pada tingkat rumah tangga merupakan contoh pendekatan mikro.

Menurut Haughton dan Khandker (2012: 157), ada tiga faktor utama yang berhubungan dengan kemiskinan, yaitu karakteristik wilayah, masyarakat, serta rumah tangga dan individu. Faktor wilayah meliputi kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir atau topan, tingkat keterpencilan, kualitas pemerintahan, serta hak kepemilikan dan implementasinya. Faktor masyarakat mencakup ketersediaan infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, layanan seperti kesehatan dan pendidikan, kedekatan dengan pasar, serta jaringan sosial. Sementara itu, faktor rumah tangga dan individu meliputi aspek demografi seperti jumlah anggota keluarga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan gender kepala keluarga; aspek ekonomi seperti status pekerjaan, jam kerja, dan kepemilikan aset; serta aspek sosial seperti kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal.



## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Status Kemiskinan Rumah Tangga

Pendidikan memegang peranan penting bagi negara berkembang dalam menghadapi perkembangan teknologi (Todaro dan Smith, 2015). Kemudian menurut Mankiw, investasi terhadap pendidikan memiliki korelasi dengan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat pada umumnya akan meningkatkan kualitasnya. Semakin tinggi kualitas seseorang, maka produktivitasnya juga akan semakin tinggi. Produktivitas yang tinggi pada akhirnya mendapatkan imbalan balas jasa berupa pendapatan yang tinggi pula sehingga kemungkinan untuk menjadi miskin lebih rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan memiliki hubungan yang negatif dengan status kemiskinan rumah tangga.

Dalam Teori "*Human Capital*" Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Sebagaimana pembangunan di bidang lain, pendidikan menjadi salah satu bidang utama selain kesehatan dan ekonomi. Perusahaan atau lapangan kerja selalu berorientasi pada profit. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang tinggi. Sebagai balas jasa, tenaga kerja tersebut akan diberi upah atau gaji yang lebih tinggi sesuai kinerjanya. Pada gilirannya tenaga kerja tersebut akan memperoleh



eraan yang lebih baik yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan  
tan maupun konsumsinya.

## 2.2.2 Hubungan antara Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Terhadap Status Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia sering dikaitkan dengan bias gender, yang berarti bahwa perempuan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk tetap atau jatuh ke dalam kemiskinan dan kemalangan (Schaner, 2012). Dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga menjadi salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan dalam hal alokasi sumberdaya di dalam rumah tangga membuat laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda. Di ruang publik, ruang-ruang partisipasi bagi perempuan sangat terbatas, misalnya dalam hal mendapatkan pekerjaan. Kepala rumah tangga perempuan mengalami tekanan yang lebih besar untuk mengurangi partisipasi di pasar tenaga kerja agar dapat menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga, khususnya dalam hal mengasuh anak serta mengerjakan pekerjaan rumah. Pandangan tersebut telah melekat lama, khususnya di kalangan masyarakat perdesaan yang memandang perempuan sebagai pelaksana urusan rumah. Hal ini juga menjadikan kepala rumah tangga perempuan harus bekerja paruh waktu dengan gaji yang rendah sehingga membuka peluang bagi rumah tangga tersebut untuk menjadi miskin. Sementara itu, rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki memiliki kerentanan lebih rendah untuk menjadi miskin. Hal itu disebabkan oleh anggapan bahwa pada umumnya tanggung jawab laki-laki adalah menafkahi dan menghidupi keluarga sehingga akan melakukan berbagai cara demi kesejahteraan keluarga. Tidak jarang juga kepala rumah tangga laki-laki mengintegrasikan pekerjaan utamanya dengan pekerjaan tambahan dengan harapan bekerja ekstra akan menambah pendapatan rumah tangga sehingga untuk menjadi miskin lebih kecil.



### 2.2.3 Hubungan antara Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Status Kemiskinan

Ketergantungan yang tinggi, terutama dari anak-anak dalam sebuah rumah tangga, berdampak besar pada tingkat kemiskinan. Semakin banyak anggota keluarga, semakin tinggi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam situasi di mana kepala keluarga harus menanggung dua hingga tiga anggota keluarga dengan pendapatan rendah, hal ini dapat menimbulkan beban yang berat. Idealnya, satu individu yang produktif seharusnya hanya menanggung satu individu yang tidak produktif, sehingga beban dapat berkurang dan kesejahteraan dapat meningkat. Namun, apabila kondisi ekonomi tidak mendukung dan ukuran keluarga tetap besar, situasi tersebut dapat menjadi semakin buruk. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan, baik sandang, papan maupun pangan. Penentuan status kemiskinan dilihat dari perbandingan antara pengeluaran perkapita setiap rumah tangga dengan garis kemiskinan yang ditetapkan di wilayah tersebut. Perhitungan pendapatan perkapita rumah tangga diperoleh dari total pendapatan rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, maka angka pengeluaran perkapita akan semakin kecil dibandingkan garis kemiskinan yang pada akhirnya membuka peluang bagi rumah tangga tersebut untuk tergolong ke dalam status rumah tangga miskin.

Mohamed Amara (2017) menemukan bahwa kepala rumah tangga dengan pendidikan rendah dan banyak anggota keluarga cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan. Rumah tangga yang memiliki banyak anggota keluarga memiliki risiko an yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga dengan anggota yang lebih sedikit.



#### **2.2.4 Hubungan Antara Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga terhadap Status Kemiskinan Rumah Tangga**

Pendapatan atau upah seseorang dihasilkan dari aktivitas ekonomi, yakni pekerjaan. Besar kecilnya penghasilan ditentukan oleh produktivitas orang tersebut dalam bekerja. Dalam sebuah rumah tangga, pemenuhan kebutuhan dan taraf hidup ditentukan oleh pendapatan yang tentunya diperoleh dari kegiatan bekerja. Pekerjaan utama yang dimiliki oleh kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dimana tingkat upah yang diperoleh berbeda-beda dari setiap sektor. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang terdapat di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan menjadi sektor basis di beberapa wilayah.

Penelitian yang dilakukan oleh Swastika & Supriyatna (2008) dan Dartanto dan Nurkholis (2013) menyatakan bahwa kepala rumah tangga yang mengalami kemiskinan umumnya bekerja pada sektor pertanian (primer). Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang kemiskinan yang tinggi di negara berkembang karena keterbatasan pada akses modal, sempitnya lahan yang dikelola atau bahkan hanya bekerja sebagai buruh tani atau tanpa kepemilikan lahan (Todaro dan Smith, 2006; Edig dan Schwarze, 2011).

Seorang kepala rumah tangga yang bekerja memiliki kemungkinan lebih kecil untuk berada dalam status miskin dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Berdasarkan hasil regresi, kemungkinan tersebut adalah 0,822 kali lebih rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sekhampu (2013) yang juga menemukan adanya hubungan negatif antara pekerjaan dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa jika kepala keluarga bekerja, maka rumah tangganya memiliki peluang yang lebih kecil untuk masuk dalam kategori rumah tangga dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Kondisi dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh kepala rumah tangga untuk



pemenuhan kebutuhan keluarga, seperti konsumsi makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

### **2.2.5 Hubungan antara Lokasi Tempat Tinggal Rumah Tangga terhadap Status Kemiskinan Rumah Tangga**

Lokasi tempat tinggal merujuk pada wilayah yang didiami oleh setiap rumah tangga. Dalam penelitian ini Lokasi tempat tinggal dibagi atas perdesaan dan perkotaan. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih memadai, ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan yang cenderung lebih tertinggal. Todaro (2006:269) bahwa penduduk miskin umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah perdesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lain yang erat diselesaikan dengan sektor ekonomi tradisional. Hal ini berarti bahwa kemiskinan seringkali terkait dengan ketergantungan pada pertanian tradisional di daerah perdesaan, di mana kesempatan untuk berkembang dan akses ke sumber daya ekonomi modern mungkin terbatas.

Hubungan antara kemiskinan dan lokasi tempat tinggal, seperti dijelaskan oleh Weber dan Jansen (2004), dapat melalui 3 cara. Pertama, lingkungan berfungsi sebagai sumber informasi, jaringan, dan norma yang menentukan aspirasi serta peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai kemakmuran. Kedua, pandangan strukturalis menganggap suatu "tempat" sebagai peluang atau hambatan, dimana daerah perdesaan umumnya menawarkan lebih sedikit peluang dan lebih banyak hambatan terhadap kemajuan ekonomi. Ketiga, model interaksi spasial menunjukkan bahwa masyarakat dan perusahaan membuat keputusan berdasarkan kondisi tersebut. Beberapa lingkungan menyediakan



ng lebih mudah terhadap pekerjaan dan informasi terkait pekerjaan akibat kepadatan lapangan kerja atau sistem transportasi yang baik, sementara t lain hal ini tidak tersedia. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Blank

(2004) menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi di kota cenderung lebih sedikit berkaitan dengan faktor-faktor alam, iklim, sumber daya alam, dan isolasi. Hal ini memungkinkan penduduk kota untuk mengakses berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Di sisi lain, daerah perdesaan mengalami keterbatasan keunggulan geografis (*geographic advantage*) yang membuat kota lebih mampu meningkatkan kesejahteraan dibandingkan desa. Kepadatan penduduk yang terjadi di daerah perkotaan lambat laun akan menimbulkan berbagai permasalahan. Ledakan penduduk yang terjadi akan menyebabkan peningkatan kriminalitas, kemacetan, pengangguran, dan kesulitan dalam penyediaan perumahan yang layak dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, kota semakin sulit memberikan kesempatan yang cukup dan akan menciptakan berbagai hambatan. Meskipun demikian, masalah ini masih dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### 2.3 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris dilakukan untuk mencari bahan referensi juga sebagai pembandingan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan empiris juga dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan atau menghindari asumsi persamaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti memasukkan beberapa penelitian terdahulu, seperti :

Eri Widhi Astuti (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus di Kabupaten Semarang), menemukan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh terhadap kemungkinan rumah tangga tersebut mengalami



an. Semakin rendah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, semakin mungkin rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Data <kan bahwa sebagian besar kepala rumah tangga miskin tidak

menyelesaikan pendidikan dasar (SD), yakni sebesar 47,9 persen. Sementara itu, 37,5 persen kepala rumah tangga miskin hanya menamatkan pendidikan di tingkat SD, 8,3 persen hanya tamat SLTP, 6,2 persen tamat SLTA, dan nol persen dari kepala rumah tangga miskin yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan antara tingkat pendidikan kepala rumah tangga dengan status kemiskinan rumah tangga tersebut.

Berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh Nunung Setiani, Wawan Hermawan, dan Ahmad Komarulzaman (2023) yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan peran pendidikan dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2012-2021, menemukan pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa penambahan satu tahun pendidikan dan banyaknya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Haris Mendra & Syamsul Amar (2016) mengemukakan bahwa pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga, artinya kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin. Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh Hidayat, R & Amar, S. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Kemiskinan Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin kepala rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Sumatera Barat, kepala rumah tangga yang dikepalai oleh laki – laki memiliki peluang lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan di Sumatera Barat. Tingkat



an memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat, bertambahnya tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh keluarga maka semakin kecil kemungkinan untuk rumah tangga menjadi

miskin. Pekerjaan utama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Jumlah anggota rumah tangga juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Sumatera Barat.

Analisis logistik menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan kepala rumah tangga berdampak pada kemungkinan bahwa rumah tangga tersebut menjadi tidak miskin (Majumder dan Biswas, 2017). Dalam penelitian yang sama, jumlah anggota keluarga yang bisa membaca (tingkat melek huruf anggota keluarga) akan mengurangi kemungkinan rumah tangga menjadi miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Najla, dan Desmawan (2023) yang didasari oleh semakin bertambahnya penduduk miskin 2020 yang meningkat hingga 0,67 %. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parsial maupun simultan pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat penduduk miskin Indonesia tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji hipotesis, serta data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, (1) Tidak terdapat pengaruh signifikan pengangguran terbuka terhadap tingkat penduduk miskin di Indonesia tahun 2020 sedangkan secara simultan. (2) Tidak terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020, (3) Tidak terdapat pengaruh signifikan pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020.

Sedefoglu & Akay (2016) melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Turki yang menggunakan data Household Budget Survey, menunjukkan bahwa

pendapatan KRT memiliki dampak signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan memiliki peluang lebih



tinggi untuk jatuh kedalam kemiskinan dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2020) menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pula beban tanggungan kepala keluarga tersebut. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Idzhar Elna Arbarizq (2024) dimana jumlah anggota keluarga yang lebih banyak sebesar 1 individu akan meningkatkan peluang termasuk pada RTP dan RTBT miskin sebesar 8,29 persen.

Sukma Direja dan Nurina Paramitasari (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa lokasi tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan. Rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan mempunyai peluang masuk ke jurang kemiskinan lebih rendah 1,413 kali dibanding rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan. Hasil ini diperkuat dengan berita resmi statistik BPS Banten (2020), yang menyatakan bahwa pada periode Maret 2020 terjadi kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin dimana persentase kenaikan penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada penduduk di wilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan di Provinsi Banten meningkat dari 4 persen pada September 2019 menjadi 5,03 persen pada Maret 2020 atau terjadi kenaikan sebesar 1,03 persen. Penduduk miskin di perdesaan hanya meningkat sebesar 0,87 persen pada periode yang sama. Pandemi Covid-19 ternyata juga berdampak pada kondisi kemiskinan masyarakat di Provinsi Banten. Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan, dimana variabel-variabel yang digunakan untuk melihat kemiskinan adalah variabel makro.



gussalim dkk, (2024) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menilai pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal mengenai pengeluaran dan cara langsung dan tidak langsung pengentasan kemiskinan melalui

penurunan ketimpangan pendapatan, serta mempertimbangkan bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi kemiskinan menurut provinsi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, termasuk data panel 2010 - 2023 dari 34 provinsi di Indonesia, yang dianalisis menggunakan autoregressive cross-lagged SEM. Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal mengenai belanja pendidikan dan kesehatan secara statistik signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara langsung di daerah-daerah di luar Jawa, namun tidak signifikan mempengaruhinya melalui ketimpangan pendapatan. Pajak meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan jaring pengaman sosial pun meningkatkannya tidak mengurangi kemiskinan di luar Pulau Jawa. Peningkatan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan harus terus berlanjut, namun diperlukan perbaikan dalam hal penargetan jaring pengaman sosial dan penguatan reformasi perpajakan sistem dan mengurangi ketimpangan.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pendekatan pengeluaran. Ketidakmampuan penduduk tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Jumlah Anggota Rumah Tangga, Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, dan Lokasi Tempat Tinggal.

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat



umnya akan meningkatkan kualitasnya dalam hal pengetahuan dan ilan yang pada akhirnya mendapatkan imbalan balas jasa berupa an yang tinggi pula sehingga kemungkinan untuk menjadi miskin lebih

rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan memiliki hubungan yang negatif dengan status kemiskinan rumah tangga.

Kemiskinan di Indonesia sering dikaitkan dengan bias gender, yang berarti bahwa perempuan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk tetap atau jatuh ke dalam kemiskinan dan kemalangan (Schaner, 2012). Dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga menjadi salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Di ruang publik, ruang-ruang partisipasi bagi perempuan sangat terbatas, misalnya dalam hal mendapatkan pekerjaan. Kepala rumah tangga perempuan mengalami tekanan yang lebih besar untuk mengurangi partisipasi di pasar tenaga kerja agar dapat menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga, khususnya dalam hal mengasuh anak serta mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara itu, rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki memiliki kerentanan lebih rendah untuk menjadi miskin. Hal itu disebabkan oleh anggapan bahwa pada umumnya tanggung jawab laki-laki adalah menafkahi dan menghidupi keluarga sehingga akan melakukan berbagai cara demi kesejahteraan keluarga.

Ketergantungan yang tinggi, terutama dari anak-anak dalam sebuah rumah tangga, berdampak besar pada tingkat kemiskinan. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam situasi di mana kepala keluarga harus menanggung dua hingga tiga anggota keluarga dengan pendapatan rendah, hal ini dapat menimbulkan beban yang berat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, maka angka pengeluaran perkapita akan semakin kecil dibandingkan garis kemiskinan yang pada akhirnya membuka peluang bagi rumah tangga tersebut untuk

ke dalam status rumah tangga miskin. Dengan kata lain, jumlah anggota berpengaruh positif terhadap status kemiskinan rumah tangga.

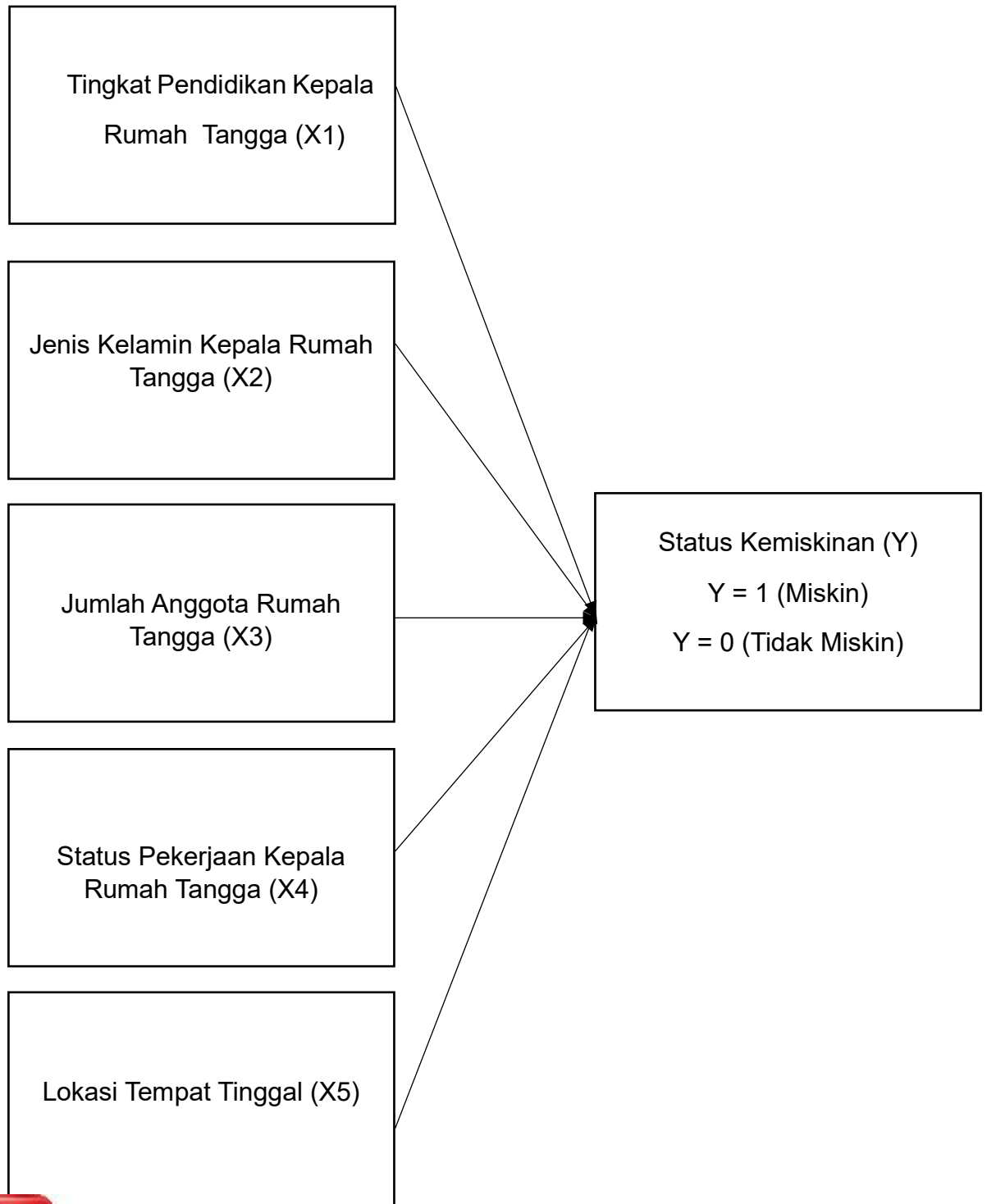


Dalam sebuah rumah tangga, pemenuhan kebutuhan dan taraf hidup ditentukan oleh pendapatan yang tentunya diperoleh dari kegiatan bekerja. Jika kepala keluarga bekerja, maka rumah tangganya memiliki peluang yang lebih kecil untuk masuk dalam kategori rumah tangga miskin dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh kepala rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, seperti konsumsi makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Hubungan antara kemiskinan dan lokasi tempat tinggal, seperti dijelaskan oleh Weber dan Jansen (2004), dapat melalui tiga cara. Pertama, lingkungan berfungsi sebagai sumber informasi, jaringan, dan norma yang menentukan aspirasi serta peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai kemakmuran. Kedua, pandangan strukturalis menganggap suatu "tempat" sebagai peluang atau hambatan, di mana daerah perdesaan umumnya menawarkan lebih sedikit peluang dan lebih banyak hambatan terhadap kemajuan ekonomi. Ketiga, model interaksi spasial menunjukkan bahwa masyarakat dan perusahaan membuat keputusan berdasarkan kondisi tersebut. Rumah tangga yang menetap di daerah perdesaan umumnya lebih banyak tergolong ke dalam rumah tangga yang berstatus miskin karena akses ke teknologi, infrastuktur dan lapangan pekerjaan cenderung terbatas dibandingkan perkotaan.



Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data. Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diduga tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh negatif terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone.
2. Diduga terdapat perbedaan pengaruh jenis kelamin kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone.
3. Diduga terdapat pengaruh positif jumlah anggota rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone.
4. Diduga terdapat perbedaan pengaruh status pekerjaan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone
5. Diduga terdapat perbedaan pengaruh lokasi tempat tinggal terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bone.

